

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ASET PEREMPUAN
DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH
(STUDI NORMATIF MENURUT UU PERKAWINAN DAN KUHPERDATA)**

**Mega Kartika¹, Shasmitha Sulthana², Hepiana Waruwu³
Universitas Prima Indonesia**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian pranikah sebagai dasar perlindungan aset perempuan serta menjelaskan kendala normatif dalam penerapannya menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberi ruang bagi calon suami dan calon istri untuk membuat perjanjian tertulis, sedangkan Pasal 35 dan Pasal 36 menjadi dasar pembedaan harta bersama dan harta bawaan. Dalam KUHPerdata, Pasal 1320 menentukan syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 menegaskan kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian pranikah berperan melindungi aset perempuan melalui pemisahan harta bawaan, pengaturan warisan, hibah, aset usaha, penghasilan pribadi, investasi, aset digital, serta pemisahan utang pribadi dan utang bersama. Kendala normatifnya terletak pada pengaturan yang masih umum, multitafsir norma, belum jelasnya perlindungan khusus terhadap aset perempuan, belum rincinya pengaturan terhadap pihak ketiga, pencatatan administratif yang belum dipahami secara efektif, belum adanya pengaturan aset digital, dan belum adanya sanksi khusus. Oleh karena itu, hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang sebaiknya dimasukkan secara rinci ke dalam perjanjian pranikah.

Kata kunci: perjanjian pranikah, perlindungan aset, perempuan, harta perkawinan.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ASET PEREMPUAN
DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN PRANIKAH
(STUDI NORMATIF MENURUT UU PERKAWINAN DAN KUHPERDATA)**

**Mega Kartika¹, Shasmitha Sulthana², Hepiana Waruwu³
Universitas Prima Indonesia**

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation of prenuptial agreements as a legal basis for protecting women's assets and to explain the normative obstacles in their implementation under the Marriage Law and the Indonesian Civil Code. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including the Marriage Law, the Civil Code, and related regulations, as well as secondary legal materials such as books and legal journals. The research shows that Article 29 of the Marriage Law provides a legal basis for prospective spouses to make a written agreement, while Articles 35 and 36 provide the basis for distinguishing joint property from personal property. Under the Civil Code, Article 1320 determines the validity requirements of an agreement, and Article 1338 affirms the binding force of a valid agreement. Prenuptial agreements protect women's assets by regulating personal property, inheritance, grants, business assets, personal income, investments, digital assets, and the separation between personal and joint debts. The normative obstacles include general legal provisions, potential multiple interpretations, the absence of specific protection for women's assets, unclear regulation concerning third parties, administrative recording that is not yet effectively understood, the absence of specific rules on digital assets, and the absence of clear sanctions. Therefore, matters that are not expressly regulated by law should be clearly incorporated into the prenuptial agreement.

Keywords: *prenuptial agreement, asset protection, women, marital property.*